



Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Belanja Rutin, dan Indeks Reformasi Birokrasi

Roy Budiharjo¹, Swarmilah Hariani², Ardio Sagita³

^{1,3}Universitas Telkom/Jl. Telekomunikasi No. 1, Bandung Terusan Buahbatu - Bojongsong, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat/Indonesia

²Universitas Mercu Buana/Jl. Meruya Selatan No.1, RT.4/RW.1, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Indonesia

Email: roybudiharjo@telkomuniversity.ac.id¹, swarmilah@mercubuana.ac.id², ardio.sagita07@gmail.com³

Citation: Budiharjo, R., Hariani, S., & Sagita, A. (2025). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Belanja Rutin, dan Indeks Reformasi Birokrasi. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 39-46. DOI: [10.32662/gaj.v8i1.3712](https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3712)

Artikel info

Artikel history:

Received: 07-07-2024

Revised: 19-1-2025

Accepted: 19-03-2025

Abstract. *This study aims to analyze the influence of local government size, capital expenditure, routine expenditure, and the bureaucratic reform index on the financial performance of local governments in Central Java Province. Secondary data were collected from district and city governments in Central Java Province, with samples selected using a purposive sampling method based on local government financial reports and information on the bureaucratic reform index from 2019-2021. This study employs multiple linear regression analysis with partial testing using the t-statistic, following classical assumption testing. The results indicate that local government size has a significant positive effect on financial performance, while capital and routine expenditures have significant negative effects. Conversely, the bureaucratic reform index has no effect on financial performance. The findings provide insights for local governments in managing finances to improve efficiency and effectiveness in public service delivery.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja modal, belanja rutin, dan indeks reformasi birokrasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder dikumpulkan dari pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah dan informasi indeks reformasi birokrasi tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji parsial melalui uji statistik t, setelah dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, belanja modal dan belanja rutin berpengaruh negatif signifikan, sementara indeks reformasi birokrasi tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Implikasi penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Keywords:

*Local Government
Size;
Expenditure;
Bureaucratic
Reform; Financial
Performance*

Corresponden author:

Email: roybudiharjo@telkomuniversity.ac.id

Pendahuluan

Reformasi pada tahun 1998 merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya pergeseran paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi ini lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah mulai diterapkan sejak Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah, 2019 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah, (2019) mengalami pergantian, yaitu menjadi Undang-Undang No 23 RI Tentang Pemerintahan Daerah, 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tentang Pemerintah Daerah, 2015 yang kemudian menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Kinerja Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo selama ini patut dipertanyakan. Pasalnya, berdasarkan rilis Indeks Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Tengah 2021 yang disiarkan secara live di kanal Youtube Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng belum lama ini, menyebutkan bahwa di provinsi tersebut angka kemiskinannya mengalami peningkatan signifikan. Sebagai informasi, kemiskinan di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Hal itu tercatat dalam Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden Nomor: B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 ditetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Dari 212 kabupaten/kota di Indonesia, 25 provinsi Jateng mencatat rekor kenaikan kemiskinan ekstrem dari 5 menjadi 19 daerah (Kedaipena.com, 2022).

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi syarat agar pihak eksternal bersedia berinvestasi di dalam daerah. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi financial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2016).

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total pendapatan. Dengan ukuran pemerintah daerah yang besar, dan pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan sumber – sumber potensi daerahnya serta dapat mengelola dengan baik seluruh potensi daerah maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah juga dipastikan akan meningkat (Mulyani & Wibowo, 2017). Penelitian Kiswanto & Fatmawati, (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Bertolak belakang

dengan hasil tersebut, penelitian Sari & Mustanda, (2019) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap atau aset lainnya dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal umumnya digunakan untuk membangun infrastruktur daerah dan fasilitas yang menunjang pelayanan publik. Hal ini berimplikasi terhadap pembangunan daerah dan roda perekonomian yang semakin berputar, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat (Mardiasmo, 2016). Penelitian Sari & Mustanda, (2019) menunjukkan hasil bahwa belanja modal daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Lain dengan hasil penelitian Suryaningsih & Sisdiyani, (2016) yang menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Belanja rutin atau lebih dikenal dengan belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dan memiliki manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial (Mardiasmo, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Astiti & Mimba, (2016) menunjukkan hasil bahwa belanja rutin tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Permatasari & Trisnaningsih, (2022) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 (Permenpan RB Nomor 26, 2020) tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya. Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrument penilaian reformasi birokrasi secara mandiri (self assessment). Hasil Penelitian Kinanti, (2023) yang menyatakan bahwa Indeks reformasi birokrasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan berbeda dengan hasil penelitian Ria, (2016) yang menghasilkan bahwa Indeks reformasi birokrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, mengevaluasi dampak belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah, serta menilai pengaruh belanja rutin terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji hubungan antara indeks reformasi birokrasi dan kinerja pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Sampel diambil dari populasi tersebut menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah yang telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun 2019 hingga 2021 dan laporan tersebut tersedia melalui laman resmi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) masing-masing daerah; dan (2) memiliki data terkait Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah untuk periode tahun 2019 hingga 2021, yang tersedia di laman resmi Kementerian PAN-RB atau diperoleh langsung dari pemerintah daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, (2017), data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui perantara, seperti dokumen atau orang lain. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui berbagai sumber resmi, antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta laman resmi pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 1:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_SIZE	105	27,55	29,29	28,4144	0,34605
X2_CE	105	25,04	27,69	26,3345	0,46346
X3_OE	105	27,34	29,04	28,2812	0,34023
X4_BR	105	35,00	76,00	63,0857	10,51749
Y_LGFP	105	0,92	1,28	1,0191	0,05623
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data diolah, 2024

1. Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai nilai Minimum sebesar 27,55 atau senilai Rp 918.350.000.000,- pada kota Salatiga tahun 2022, nilai Maksimum sebesar 29,29 atau senilai Rp 5.275.320.000.000,- pada kota Semarang tahun 2023 dan memiliki nilai rata-rata 28,4144. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 0,34605. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah terdistribusi normal, karena nilai deviasi standar lebih kecil dari nilai rata-rata variabel.
2. Belanja Modal mempunyai nilai Minimum sebesar 25,04 atau senilai Rp 918.350.000.000,- pada kota Salatiga tahun 2022, nilai Maksimum sebesar 27,69 atau senilai Rp 1.048.840.000.000,- pada kota Semarang tahun 2023 dan memiliki nilai rata-rata 26,3345. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 0,46346. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal terdistribusi normal, karena nilai deviasi standar lebih kecil dari nilai rata-rata variabel.
3. Belanja Rutin mempunyai nilai Minimum sebesar 27,34 atau senilai Rp 740.040.000.000,- pada kota Magelang tahun 2021, nilai Maksimum sebesar 29,04 atau senilai Rp 4.096.240.000.000,- pada kota Semarang tahun 2023 dan memiliki nilai rata-rata 28,2812. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 0,34023. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja rutin terdistribusi normal, karena nilai deviasi standar lebih kecil dari nilai rata-rata variabel.
4. Indeks Reformasi Birokrasi mempunyai nilai Minimum sebesar 27,55 atau senilai Rp 918.350.000.000,- pada kota Salatiga tahun 2022, nilai Maksimum sebesar 29,29 atau senilai Rp 5.275.320.000.000,- pada kota Semarang tahun 2023 dan memiliki nilai rata-rata 63,0857. Sedangkan nilai simpangan bakunya

adalah 10,51749. Hal ini menunjukkan bahwa variabel indeks reformasi birokrasi terdistribusi normal, karena nilai deviasi standar lebih kecil dari nilai rata-rata variabel.

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai nilai Minimum 0,92 pada Kota Tegal tahun 2023, nilai Maksimum sebesar 1,28 pada Kabupaten Kudus tahun 2021 dan memiliki nilai rata-rata 1,0191. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 0,05623. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah terdistribusi normal, karena nilai deviasi standar lebih kecil dari nilai rata-rata variabel.

Tabel 2. Hasil uji statistik t, Uji f dan Uji koefisien determinasi

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	1,938	0,435		4,454	0,000
	SIZE	0,523	0,110	3,193	4,755	0,000
	CE	-0,069	0,018	-0,560	-3,797	0,000
	OE	-0,494	0,103	-2,973	-4,810	0,000
	BR	-0,003	0,000	-0,006	-0,066	0,947

a. Dependent Variable: LGFP

F test : 0,000^b

Adjusted R Square : 0,196

Sumber: Data diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi adjusted r square memiliki nilai 0,196 sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan variabel independen (ukuran pemerintah daerah, belanja modal, belanja rutin dan indeks reformasi birokrasi) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) terbatas namun mendukungnya secara bersama-sama karena mengalami peningkatan. Nilai adjusted r square (R²) diubah menjadi bentuk persentase, artinya persentase kontribusi ukuran pemerintah daerah, belanja modal, belanja rutin dan indeks reformasi birokrasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 19,60% sedangkan sisanya (100%-19,6% = 80,4%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji signifikansi simultan (uji f) pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan yang signifikan untuk variabel dependen.

Sesuai dengan hasil hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa antar variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen, maka diperlukan regresi linier berganda untuk membuat model analisis

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil koefisien regresi pada tabel 2 menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki t hitung sebesar 4,755 dengan kinerja keuangan daerah sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p (0,000) < tingkat signifikansi (0,05), sehingga H1 berarti berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa total pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan program-program pemerintah serta kegiatan operasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Selain hal tersebut, anggaran dan perencanaan pembangunan daerah yang searah

berimplikasi terhadap pengelolaan pendapatan yang efektif dan tepat sasaran. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan program secara efektif dan efisien perlu adanya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD diharmonisasikan dengan rencana pembangunan daerah, sehingga pendapatan daerah yang dialokasikan dalam APBD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 juga disebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak seluruhnya bergantung pada anggaran, karena inovasi-inovasi dibutuhkan untuk mengantisipasi rendahnya realisasi pendapatan daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kiswanto & Fatmawati, (2019) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Sari & Mustanda, (2019) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil koefisien regresi pada tabel 2 menunjukkan bahwa belanja modal memiliki t hitung negatif sebesar 3,797 dengan probabilitas 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p (0,000) < tingkat signifikansi (0,05), sehingga H_2 berarti belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan anggaran belanja modal secara maksimal untuk membangun infrastruktur daerah dan fasilitas yang menunjang pelayanan publik. Selain hal tersebut, perencanaan pembangunan infrastruktur daerah searah dengan anggaran belanja modal yang ditetapkan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan dengan baik, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Astuti & Mimba, 2016) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Lain dengan hasil penelitian (Suryaningsih & Sidiyanti, 2016) yang menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Rutin Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil koefisien regresi pada tabel 2 menunjukkan bahwa belanja rutin memiliki t hitung negatif sebesar 4,810 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p (0,000) < tingkat signifikansi (0,05), sehingga H_3 berarti belanja rutin berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya realisasi belanja rutin yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial berimplikasi atas kenaikan atau penurunan kinerja pemerintah daerah. Proporsi belanja rutin yang terbesar digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk pemenuhan hak pegawai melalui pembayaran gaji dan tunjangan, yaitu sebesar 60% dari total belanja rutin (berdasarkan statistik deskriptif). Pemenuhan hak pegawai tersebut berhubungan dengan program pembangunan daerah, sehingga realisasi belanja rutin berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Astuti & Mimba, 2016) yang menunjukkan hasil bahwa belanja rutin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Indeks Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil koefisien regresi pada tabel 2 menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi memiliki t hitung negatif sebesar 0,066 dengan probabilitas 0,947. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p (0,947) > tingkat signifikansi (0,05), sehingga H_4 berarti bahwa indeks reformasi birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih kurang menggembarakan. Sebesar 74% dari sampel (berdasarkan statistik deskriptif) memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi berada di rentang 60-70. Rentang indeks tersebut termasuk kategori “Cukup Baik”, yang artinya adalah penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi (Permenpan RB Nomor 26, 2020).

Selain itu, untuk mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi, pemerintah daerah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Namun, pelaksanaan PMPRB hanya dapat dilakukan jika dokumen administrasi atau portofolio telah dipenuhi. Penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya memverifikasi dokumen administrasi, bukan hasil atau manfaat pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menerima Indeks Reformasi Birokrasi paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, tetapi Kabupaten Banyumas juga termasuk dalam sebelas kabupaten paling miskin di Provinsi Jawa Tengah (data BPS). Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi yang tinggi tidak selalu berarti kinerja pemerintah daerah yang baik atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah pemerintah daerah.

Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum memperhatikan hasil dan hanya berfokus pada pemenuhan dokumen. Oleh karena itu, mulai tahun 2023, reformasi birokrasi akan dilaksanakan melalui program tematik yang berfokus pada hasil atau keuntungan, sesuai Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Sebagai contoh, jika prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2023 adalah mengentaskan kemiskinan, maka penilaian yang dilakukan berfokus pada penurunan angka kemiskinan.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulannya bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin baik kinerjanya dalam mengelola keuangan. Sebaliknya, belanja modal dan belanja rutin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pada kedua aspek ini dapat berdampak pada menurunnya efektivitas pengelolaan keuangan. Sementara itu, indeks reformasi birokrasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dapat mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan belum cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan memastikan bahwa pertumbuhan organisasi sejalan dengan peningkatan kapasitas manajerial dan fiskal. Selain itu, kebijakan terkait belanja modal dan belanja rutin perlu dievaluasi agar pengeluaran dapat dialokasikan secara lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi

masyarakat. Reformasi birokrasi juga perlu diperkuat dengan meningkatkan transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Astiti, D. N. ., & Mimba, N. P. S. . (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal E-Akuntansi*, 14(3).
- Kedaipena.com. (2022). *Angka kemiskinan di Jateng meningkat, kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipertanyakan*. Kedaipena. <https://www.kedaipena.com>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- Kinanti, N. (2023). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal, Indeks Reformasi Birokrasi, Dan Hasil Evaluasi Sakip Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2021*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- Permatasari, D. A., & Trisnainingsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, No. 58. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 191. Sekretariat Negara
- Ria, M. D. (2016). *Analisis pengaruh reformasi birokrasi terhadap kinerja pemerintah daerah: Studi kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Tesis, Institut Pertanian Bogor.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 759-4787.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.
- Suryaningsih, N. M., & Sisdiyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1453-1481